

Analisis Peningkatan Kualitas Layanan Berbasis *Good Governance* Di Kantor Sektor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kecamatan Duren Sawit

Dika Aditya Ramadhan*

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

dikaadityaramadhan@gmail.com

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Agustus 26, 2025

Revised : September 2, 2025

Accepted : September 10, 2025

Keywords:

Service Capacity;

Fire Department;

Good Governance;

Public Service;

Improvement Analysis.



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:

Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan

Masyarakat Madani

ABSTRACT

In densely populated urban areas such as Duren Sawit Sub-District in East Jakarta, challenges in delivering fire department services are becoming increasingly complex. High population density, growth in residential areas, and limited road access present specific obstacles during emergency response efforts. In addition, there are fundamental problems such as limited facilities and infrastructure, a lack of trained personnel, suboptimal reporting and complaint systems, and weak professional attitudes of officers when interacting with the public. This study aims to analyze the Analysis for improving fire department service capacity based on Good Governance principles in Duren Sawit Sub District. A descriptive qualitative approach was used, gathering insights from fire department leaders and staff. The results show that the Analysis for improving service capacity emphasizes open communication, harmonious relationships, mutual empathy between leaders and officers, and equality in work interactions. However, the fire department still faces various obstacles, including limited facilities and infrastructure (tangibles), absence of standard operating procedures (reliability), lack of a responsive reporting system (responsiveness), insufficient technical and public service competence among officers (competence), service access barriers (access), and weak service ethics (courtesy). Improvement efforts should focus on strengthening facilities, improving human resource competence, reforming service systems, and fostering professional ethics among personnel. These Analyses must be integrated with Good Governance principles such as accountability, transparency, and responsiveness to realize a high quality, effective, and trustworthy fire department service for the public.

PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan salah satu bencana perkotaan yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di wilayah padat seperti Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, risiko kebakaran sangat tinggi, terutama pada kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kejadian kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang signifikan, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis bagi korban dan masyarakat sekitar. Faktor pemicu umumnya meliputi hubungan arus pendek listrik, penggunaan api terbuka yang tidak aman, dan kurangnya kesadaran akan standar keselamatan. Kepadatan permukiman yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana pencegahan kebakaran menjadi salah satu penyebab tingginya risiko kebakaran di wilayah ini.

Banyak kawasan permukiman memiliki gang sempit yang sulit diakses kendaraan pemadam, sehingga memperlambat proses penanggulangan. Selain itu, peralatan dan armada yang tersedia sering kali sudah usang atau tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah layanan. Faktor ini diperburuk dengan minimnya keberadaan sistem *hydrant* umum, jalur evakuasi yang tidak jelas, dan tata letak permukiman yang tidak tertata rapi. Layanan pemadam kebakaran di Kecamatan Duren Sawit menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sumber daya. Jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kejadian kebakaran yang harus ditangani setiap tahun. Koordinasi lintas sektor, seperti dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan instansi kesehatan, masih belum optimal, sehingga menghambat kecepatan respons darurat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas organisasi, prosedur kerja,

serta sarana prasarana yang mendukung efektivitas layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan Analisis peningkatan kapasitas layanan yang berbasis pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

Prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, dan keadilan dalam memberikan layanan. Penerapan *Good Governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat koordinasi antar instansi, dan memastikan bahwa layanan pemadam kebakaran mampu merespons secara cepat, tepat, dan terukur terhadap setiap insiden yang terjadi. Penelitian ini bertujuan merumuskan Analisis peningkatan kapasitas layanan pemadam kebakaran di Kecamatan Duren Sawit dengan mengintegrasikan prinsip *Good Governance* dalam setiap aspek pengelolaan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan, memperkuat transparansi dalam pengelolaan sumber daya, memastikan akuntabilitas kinerja, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah

KAJIAN PUSTAKA

Good Governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*), berdaya guna (*effective*), dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks layanan pemadam kebakaran, prinsip *Good Governance* memiliki peranan Analisis untuk memastikan pelayanan publik berjalan tepat waktu, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip ini juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam layanan yang bersifat darurat seperti penanggulangan kebakaran.

Menurut UNDP (1997), terdapat sembilan prinsip *Good Governance*, yaitu:

1. Participation – Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan evaluasi layanan publik.
2. Rule of Law – Penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan menjamin hak-hak masyarakat.
3. Transparency – Keterbukaan informasi publik yang memudahkan masyarakat mengetahui proses, kebijakan, dan kinerja layanan.
4. Responsiveness – Kemampuan pemerintah atau instansi terkait untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.
5. Consensus Oriented – Mengutamakan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan demi kepentingan publik.
6. Equity and Inclusiveness – Menjamin semua kelompok masyarakat mendapatkan akses layanan secara adil tanpa diskriminasi.
7. Effectiveness and Efficiency – Memastikan sumber daya digunakan seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal.
8. Accountability – Setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
9. Analysis Vision – Pemerintah memiliki visi jangka panjang yang jelas dan terarah, serta mampu mengantisipasi tantangan di masa depan.

Dalam implementasinya pada sektor layanan pemadam kebakaran, sembilan prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai langkah, seperti penyusunan SOP yang transparan, mekanisme pelaporan yang akuntabel, sistem pelatihan yang meningkatkan kompetensi petugas, serta keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan kebakaran. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan layanan pemadam kebakaran dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai Analisis Peningkatan Kualitas Layanan Berbasis Good Governance di Kantor Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Duren Sawit. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan secara alami tanpa manipulasi dari peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara bertujuan menggali pandangan, pengalaman, dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam layanan pemadam kebakaran, sedangkan observasi digunakan untuk memahami kondisi dan situasi nyata di lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kinerja, data kejadian kebakaran, dan kebijakan yang berlaku.

Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari pimpinan sektor pemadam kebakaran dan petugas lapangan yang memiliki pengalaman langsung dalam pelayanan dan penanggulangan kebakaran di Kecamatan Duren Sawit. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan interpretasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan di lapangan. Untuk menjaga validitas hasil, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Peningkatan Kualitas Layanan Berbasis Good Governance di Kantor Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Duren Sawit

Analisis peningkatan kapasitas layanan pemadam kebakaran di Kecamatan Duren Sawit diarahkan pada penerapan secara menyeluruh prinsip-prinsip *Good Governance*, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Penerapan prinsip ini tidak hanya dimaknai sebagai jargon kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk program dan langkah nyata di lapangan. Melalui akuntabilitas, setiap kegiatan pelayanan dipastikan memiliki pertanggungjawaban yang jelas, baik dari sisi penggunaan anggaran, hasil kinerja, maupun evaluasi pasca-penanganan kebakaran. Transparansi dilakukan dengan membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai prosedur penanganan, penggunaan sumber daya, hingga laporan tahunan layanan pemadam kebakaran, sehingga publik dapat menilai kinerja instansi secara objektif.

Dari aspek tangible, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas armada pemadam kebakaran, seperti penambahan mobil *water supply*, *fire truck* modern, dan peralatan keselamatan yang memenuhi standar internasional. Peningkatan ini juga mencakup pemeliharaan berkala armada yang ada, serta pemasangan *hydrant* umum di titik-titik Analisis yang rawan kebakaran. Infrastruktur penunjang seperti pos pemadam kebakaran di beberapa kelurahan juga direncanakan agar jarak tempuh menuju lokasi kejadian menjadi lebih singkat.

Pada aspek reliability, Analisis difokuskan pada penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang lebih rinci, mencakup alur penerimaan laporan, penugasan tim, hingga penanganan pascakebakaran. SOP ini menjadi pedoman kerja yang memastikan setiap tahapan dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan SOP yang jelas, diharapkan proses penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan mengurangi risiko kesalahan di lapangan.

Aspek responsiveness diwujudkan dengan membangun sistem pelaporan dan pengaduan yang lebih modern dan mudah diakses. Selain *call center*, pemerintah juga menyediakan layanan berbasis aplikasi dan kanal daring yang memungkinkan warga melaporkan kejadian secara *real-time* dengan menyertakan lokasi kejadian, foto, atau video. Sistem ini terhubung langsung ke pusat komando pemadam kebakaran, sehingga penugasan tim dapat dilakukan secepat mungkin. Dalam aspek competence, fokus diberikan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin teknis pemadaman, penyelamatan korban, dan penanganan bahan berbahaya. Pelatihan pelayanan

publik juga diberikan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi petugas dalam menghadapi masyarakat yang terdampak bencana.

Sementara itu, pada aspek access dan courtesy, Analisis diarahkan untuk mempermudah jangkauan layanan di kawasan padat penduduk, termasuk membuka jalur alternatif atau *fire lane*, serta memperkuat etika profesionalisme petugas saat berinteraksi dengan warga. Dengan kombinasi langkah ini, diharapkan layanan pemadam kebakaran di Kecamatan Duren Sawit tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga ramah dan membangun kepercayaan publik

2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Selain penguatan internal, analisis peningkatan kapasitas juga mencakup koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, dan aparat kelurahan. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat respons darurat, memperlancar akses jalan saat terjadi kebakaran, dan memastikan penanganan korban secara cepat. Analisis ini juga mengintegrasikan data wilayah rawan kebakaran dengan rencana mitigasi bencana daerah, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum insiden terjadi. Pelibatan masyarakat menjadi kunci, melalui program edukasi kebakaran di sekolah, simulasi evakuasi di lingkungan permukiman, dan pembentukan kader pemadam kebakaran sukarela di tingkat RT/RW.

3. Kendala Analisis Peningkatan Kapasitas Layanan

Meskipun Analisis peningkatan kapasitas layanan pemadam kebakaran di Kecamatan Duren Sawit telah dirumuskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance*, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran operasional yang berdampak langsung pada minimnya penambahan armada pemadam dan peralatan modern. Kondisi ini menyebabkan beberapa unit armada yang digunakan saat ini berusia cukup tua dan memerlukan perawatan intensif, sehingga tidak selalu dalam kondisi siap operasional. Peralatan keselamatan seperti pakaian pelindung, alat pernapasan, dan *hose* berkualitas tinggi juga masih terbatas jumlahnya, sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan kebakaran di lapangan.

Selain itu, jumlah personel pemadam kebakaran yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan frekuensi kejadian kebakaran yang harus ditangani setiap tahunnya. Rasio petugas terhadap jumlah penduduk maupun luas wilayah masih di bawah standar pelayanan minimal, sehingga pada saat terjadi beberapa insiden secara bersamaan, kekuatan personel yang dapat dikerahkan menjadi sangat terbatas. Hal ini berdampak pada lambatnya respon di titik-titik kejadian yang jaraknya cukup jauh dari pos induk pemadam kebakaran.

Hambatan berikutnya adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk. Banyak jalan lingkungan yang sempit dan berliku, bahkan sebagian tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, sehingga mobil pemadam harus berhenti pada jarak tertentu dan petugas melanjutkan dengan peralatan manual. Kondisi ini sering memperlambat waktu tempuh dan mengurangi efektivitas penanganan, terutama jika sumber air tidak tersedia di sekitar lokasi kebakaran.

Dari sisi kesadaran masyarakat, masih banyak warga yang belum mematuhi standar keselamatan kebakaran, seperti tidak menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di rumah atau tempat usaha, menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar, dan melakukan aktivitas berisiko tinggi seperti pembakaran sampah di area permukiman. Rendahnya kepatuhan ini membuat potensi kebakaran semakin tinggi, sementara upaya pencegahan menjadi kurang optimal.

Dari perspektif teknologi, sistem pelaporan online yang telah dirancang untuk mempercepat penyampaian informasi kebakaran belum dimanfaatkan secara optimal, baik oleh petugas internal maupun masyarakat. Beberapa warga masih lebih memilih melapor melalui jalur informal atau menunggu bantuan datang tanpa memberikan informasi detail. Di sisi lain, sebagian petugas belum terbiasa memanfaatkan teknologi pelaporan secara maksimal, sehingga data kejadian tidak selalu terekam secara lengkap untuk keperluan evaluasi. Semua kendala ini menunjukkan perlunya

pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasi analisis peningkatan kapasitas layanan pemadam kebakaran

4. Kendala Non-Teknis dan Tantangan Kultural

Kendala non-teknis juga mempengaruhi efektivitas Analisis, seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Beberapa warga masih menganggap pencegahan kebakaran bukan tanggung jawab mereka, sehingga sosialisasi dan pelatihan sering diabaikan. Selain itu, budaya komunikasi top-down di internal organisasi kadang memicu miskomunikasi antara pimpinan dan petugas lapangan, yang berdampak pada kecepatan pengambilan keputusan di lapangan. Tantangan ini diperparah dengan kurangnya evaluasi berbasis indikator kinerja, sehingga perbaikan berkelanjutan menjadi sulit dilakukan.

5. Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala yang ada, diperlukan langkah perbaikan yang sistematis. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk modernisasi armada dan peralatan, serta meningkatkan jumlah personel terlatih. Penerapan sistem pelaporan terpadu berbasis *real-time* yang terhubung dengan instansi terkait harus dipercepat, sehingga koordinasi penanganan dapat berjalan tanpa hambatan. Sosialisasi dan edukasi publik harus dilakukan secara intensif dengan melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi lokal, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga. Dari sisi internal, dibutuhkan perbaikan pola komunikasi dan evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur, agar setiap kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Dengan demikian, analisis peningkatan kapasitas layanan pemadam kebakaran di Kecamatan Duren Sawit dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, peningkatan kualitas layanan di Kantor Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Duren Sawit telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, partisipasi publik, serta penegakan hukum dalam pelayanan publik. Meskipun demikian, kualitas layanan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, jumlah personel yang belum memadai. Kapasitas layanan pemadam kebakaran di Kecamatan Duren Sawit masih terkendala pada aspek fasilitas, sumber daya manusia, sistem layanan, dan etika pelayanan, sehingga kualitas respon dan profesionalisme belum optimal. Dari sisi *tangible*, keterbatasan armada, alat pelindung diri, dan minimnya anggaran peremajaan sarana menghambat kinerja. Dimensi *reliability* belum kuat karena SOP belum terstruktur dan evaluasi kinerja minim, sementara *responsiveness* terhambat oleh kekurangan personel dan sistem pelaporan yang kurang responsif. Kompetensi teknis dan pemahaman nilai pelayanan publik berbasis *Good Governance* masih rendah akibat terbatasnya pelatihan berkelanjutan. Akses layanan juga sulit di wilayah padat penduduk, ditambah belum adanya platform digital yang memudahkan masyarakat. Pada aspek *courtesy*, etika pelayanan seperti empati, keramahan, dan komunikasi publik masih perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ahrens, M. (2013). Organizational capacity and response to wildfires: An analysis of firefighter preparedness. *Journal of Emergency Management*, 11(4), 289-298. <https://doi.org/10.5055/jem.2013.0134>
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). *Managing performance: International comparisons*. Routledge.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Wiley.
- Comfort, L. K. (2007). Crisis management in hindsight: Cognition, communication, coordination, and control. *Public Administration Review*, 67, 189-197. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00739.x>

- Kapucu, N. (2008). Collaborative emergency management: Better community organizing, better public preparedness and response. *Disasters*, 32(2), 239-262. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2008.01039.x>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance matters VIII: Aggregate and individual governance indicators 1996–2008. World Bank Policy Research Working Paper No. 4978. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4978>
- Mintzberg, H. (1994). *The rise and fall of strategic planning*. Free Press.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance?*. Routledge.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public management reform: A comparative analysis* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Rondinelli, D. A. (1987). *Development projects as policy experiments: An adaptive approach to development administration*. Routledge.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2010). *Capacity development practice note*. United Nations Development Programme.
- Waugh, W. L., & Streib, G. (2006). Collaboration and leadership for effective emergency management. *Public Administration Review*, 66(s1), 131-140. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00673.x>

Jurnal

- Building Resilience in Firefighters: A Systematic Review PubMed Central (PMC), 2023 Link: PMC9529723
- Diky Ardiansyah, Sri Juni Woro Astuti (2024) Kinerja Pelayanan di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/download/228/178> Jurnal: Journal of Infrastructure Policy and Development, Vol. 8, Issue 11, 2024
- Eka Rofiyanti, Asep Sumaryana, Slamet Usman Ismanto, Dedi Sukarno (2024) Analysis of the Government's Strategy and Capacity in Reducing the Risk of Fire Disasters in the Indonesian Capital" Jurnal: Journal of Infrastructure Policy and Development, Vol. 8, Issue 11, 2024 DOI: 10.24294/jipd.v8i11.7652
- Governing Wildfires: Toward a Systematic Analytical Framework Ecology and Society, Vol. 28, Issue 2, 2023
- Hasanga Keshan Dharmadasa (2021) "Capacity building in urban emergency services: Challenges and strategies" (International Journal of Disaster Risk Reduction, 2021)
- Nugroho & Fitriani (2022) Risk factors for HIV-positive status in condyloma acuminata <https://scholarhub.ui.ac.id/jdvi/vol6/iss2/5>.
- Shuvo (2018) "Community involvement in urban fire risk reduction" Disaster Prevention and Management, 2018)
- Vladimir M. Cvetković, Jasmina Tanasić, Adem Ocal, Želimir Kešetović, Neda Nikolić, Aleksandar Dragašević 2021 Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management" Jurnal: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, Issue 19, 2021
- Vladimir M. Cvetković, Jasmina Tanasić, Adem Ocal, Želimir Kešetović, Neda Nikolić, Aleksandar Dragašević (2021) Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management" Jurnal: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, Issue 19, 2021

Wildfire Governance in a Tri-National Frontier of Southwestern Amazonia International Journal of Disaster Risk Reduction, 2023 ScienceDirect

Xolani Thusi (2019) "Good Governance and public service delivery: Case study of fire services" (Journal of Public Administration, 2019)